

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir investasi asing telah menjadi salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu inisiatif investasi yang paling signifikan adalah *Belt and Road Initiative* (BRI), yang dikenalkan oleh Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia pada tahun 2013. Program ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas dan kerja sama antar negara di Asia, Eropa, dan Afrika melalui pembangunan infrastruktur berskala besar (Zhang, 2018). Proyek ini mencakup berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi, yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang terlibat.

BRI dapat dianggap sebagai grand strategy, yang menonjol sebagai alat untuk mencapai tujuan utama yang mencerminkan ambisi global dan kebijakan luar negeri yang proaktif. Dengan BRI Tiongkok ingin meningkatkan konektivitas infrastruktur untuk memperkuat perdagangan dan investasi internasional, serta membuat akses yang baik ke pasar eksternal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. BRI mencerminkan keinginan Tiongkok untuk mendiversifikasi sumber daya dan energi dengan mengakses jalur perdagangan yang baru dan mengamankan pasokan bahan mentah yang vital untuk pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Inisiatif ini juga menjadi alat diplomasi ekonomi, yang memungkinkan Tiongkok untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan mitra internasionalnya. Ambisi lainnya adalah keinginan Tiongkok untuk memperluas pengaruh geopolitiknya melalui pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang besar di berbagai negara.

Dengan membangun hubungan ekonomi yang erat, Tiongkok dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk aturan dan norma-norma global. BRI juga menjadi respons terhadap surplus kapasitas industri Tiongkok, dengan memfasilitasi ekspor teknologi, peralatan, dan keahlian konstruksi ke negara-negara mitra. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini bersama-sama membentuk landasan ambisius Tiongkok untuk memimpin dalam menggagas proyek kolaboratif yang melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia. Melihat kembali sejarah Tiongkok dalam perdagangan internasional memiliki akar yang panjang, Tiongkok sebagai salah satu pusat perdagangan utama sejak zaman kuno.

Sejak Dinasti Han (206 SM - 220 M), Jalur Sutra menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa, memungkinkan pertukaran budaya, teknologi, dan barang dagangan. Dinasti-dinasti selanjutnya seperti Tang dan Song juga melanjutkan tradisi perdagangan ini, memperkaya kekayaan dan pengetahuan Tiongkok. Namun, pada tahun 1839 hingga 1860, kekalahan dalam Perang Opium dan ketidakstabilan politik membawa Tiongkok ke fase isolasi. Setelah itu, reformasi ekonomi

pada tahun 1978 oleh Deng Xiaoping membuka Tiongkok kembali ke pasar global, dan mengubahnya menjadi motor ekonomi dunia pada awal abad ke-21 (tahun 2000-an).

Peran Tiongkok dalam perdagangan internasional semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat. Deng Xiaoping memperkenalkan kebijakan pembukaan dan reformasi pada 1978, membuka pintu bagi investasi asing dan pertumbuhan ekspor, Tiongkok mengalami perubahan besar dalam arah kebijakan ekonominya dengan meluncurkan program reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah awal reformasi ini mencakup liberalisasi sektor pertanian, yang memungkinkan petani untuk memiliki tanah mereka sendiri dan menjual kelebihan hasil pertanian mereka di pasar bebas. (Naughton, 2007)

Dampak dari reformasi ekonomi ini sangat signifikan, dengan Tiongkok mencatat pertumbuhan ekonomi yang pesat selama periode tersebut. Pertumbuhan PDB rata-rata sekitar 10% per tahun, Selama periode ini, Tiongkok juga mengalami pergeseran struktural dalam ekonominya. Mengalami peralihan dari pertanian yang didominasi menjadi lebih berorientasi industri, dengan sektor manufaktur yang berkembang pesat dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi sehingga mulai tahun 2001 Tiongkok berhasil menjadi kekuatan ekonomi global yang dominan. (Qian, 2003)

Pada tahun yang sama yakni 2001 Tiongkok bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) hal ini semakin memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional. Sebagai produsen terbesar di dunia dan konsumen pasar yang berkembang pesat, Tiongkok memainkan peran kunci dalam rantai pasok global, menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global dan membangun kemitraan ekonomi yang erat dengan banyak negara di seluruh dunia. Pembentukan BRI pada tahun 2013 dapat dilihat sebagai bagian dari strategi Tiongkok untuk kembali memainkan peran sentral dalam perdagangan internasional dan geopolitik global setelah periode tersebut. Selain itu, kebijakan reformasi ekonomi oleh Deng Xiaoping pada 1978 menjadi pendorong penting dalam membuka Tiongkok kembali ke pasar global. (Wang, 2013)

Keterlibatan dalam organisasi internasional, bergabungnya Tiongkok dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001, ini mencerminkan upaya Tiongkok untuk memperluas dan memperbarui warisan sejarahnya sebagai pemimpin perdagangan dan pemain kunci dalam sistem ekonomi global. Bergabungnya Tiongkok dalam WTO juga membuka pintu untuk membangun kemitraan ekonomi yang erat dengan banyak negara di seluruh dunia. Dengan mengikuti aturan perdagangan yang telah disepakati secara internasional, Tiongkok memperoleh legitimasi dan kepercayaan dalam hubungannya dengan mitra dagangnya. Ini menghasilkan peningkatan investasi asing langsung ke Tiongkok dan memperluas jaringan perdagangan internasional negara ini.

Kebangkitan besar Tiongkok terjadi antara 1990-an hingga awal 2000-an merupakan tahun kebangkitan Tiongkok, yang lebih dikenal dengan istilah *The Rise of China*, mencerminkan kemampuannya sebagai kekuatan regional utama di Asia. Selain itu, Tiongkok juga dipandang memiliki potensi untuk menjadi hegemon global yang dapat menggantikan dominasi Amerika Serikat. *The Rise of China* juga menandai transformasi negara tersebut dari kekuatan regional menjadi kekuatan global. Tiongkok mulai memperluas pengaruhnya di Asia dan sekitarnya melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), serta pengaruh ekonomi dan diplomatiknya yang semakin kuat di kawasan Asia Pasifik. Hal ini menjadikan Tiongkok sebagai *regional power* di Asia dan menempatkannya dalam posisi yang bisa menyaingi hegemoni Amerika Serikat di dunia. Salah satu indikator penting dari kebangkitan Tiongkok adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)-nya yang terus meningkat. Pada tanggal 15 Februari 2021, PDB Tiongkok secara resmi melampaui Amerika Serikat dalam hal paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*). Berdasarkan data dari *International Monetary Fund (IMF)*, ekonomi Tiongkok dalam hal PPP mencapai \$24,2 triliun pada tahun 2020, mengungguli ekonomi Amerika Serikat yang tercatat sebesar \$20,8 triliun. Meskipun dalam hal nominal PDB Tiongkok masih berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat, dominasi dalam PPP menunjukkan kekuatan nyata ekonomi Tiongkok di dunia. (Qian, 2003)

Faktor lain yang mendukung kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global adalah kemampuannya untuk membangun kekuatan militer,

memperkuat diplomasi, serta keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi internasional. Dengan populasi terbesar di dunia, kekuatan teknologi yang semakin berkembang, dan pengaruh geopolitik yang meluas. Kapasitas Tiongkok tercermin melalui kebijakan Presiden Xi Jinping dalam mengimplementasikan program Belt and Road Initiative (BRI). Inisiatif ini telah mencakup lebih dari 65 negara, melibatkan lebih dari 62% populasi dunia, mencakup 35% perdagangan global, serta berkontribusi terhadap lebih dari 31% PDB dunia. Program ini memiliki lima tujuan utama, yakni pertama, koordinasi kebijakan untuk mendorong kerja sama antarnegara dalam pelaksanaan berbagai proyek pembangunan. Kedua, pertukaran budaya yang berfungsi sebagai jembatan untuk memperkuat koneksi antar masyarakat, membangun pemahaman lintas budaya, dan mendukung kerja sama internasional. Ketiga, integrasi keuangan melalui peningkatan kolaborasi moneter dan pengelolaan risiko keuangan bersama. Keempat, kemudahan perdagangan dan investasi lintas batas guna memperkuat integrasi ekonomi global. Kelima, konektivitas fasilitas yang berfokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan hubungan antar negara. BRI menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong kolaborasi internasional di berbagai sektor. (Susanto, 2022)

Tiongkok menyediakan dana dan teknologi untuk membangun proyek-proyek infrastruktur di negara-negara peserta BRI. Proyek-proyek ini meliputi jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Pembiayaan sering dilakukan melalui pinjaman lunak dari bank-bank

Tiongkok, seperti China Development Bank dan Exim Bank of China. Contoh nyatanya adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia, Pelabuhan Gwadar di Pakistan, dan Jalur Rel Kereta Standard Gauge di Kenya. Negara-negara peserta sering kali menerima pinjaman besar dari Tiongkok untuk mendanai proyek infrastruktur. Pinjaman ini sering kali disalurkan melalui mekanisme seperti kerja sama bilateral, bank multilateral, atau lembaga keuangan BRI yang dikelola oleh Tiongkok. Pinjaman ini bisa bersifat lunak dengan tingkat bunga rendah. Tiongkok tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga transfer teknologi dan keahlian melalui perusahaan-perusahaan konstruksi yang dikirim ke negara-negara mitra BRI. Proyek-proyek ini sering dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi dan insinyur Tiongkok, yang membawa teknologi dan tenaga kerja mereka sendiri untuk memastikan pembangunan sesuai standar Tiongkok. BRI juga mendorong peningkatan perdagangan antara negara-negara peserta dengan Tiongkok. Melalui pembangunan infrastruktur, negara-negara ini lebih mudah mengakses pasar global, dan Tiongkok juga meningkatkan investasinya dalam berbagai sektor ekonomi, seperti energi, manufaktur, dan pertanian. (Firdaus, 2020)

Keberhasilan BRI dalam meningkatkan perekonomian negara tujuan terlihat dari pembangunan infrastruktur skala besar yang mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi asing, dan penciptaan lapangan kerja di negara penerima. Proyek-proyek yang di realisasikan seperti pembuatan jalur kereta api, pelabuhan, dan jalan raya yang

membantu mempercepat konektivitas internasional dan mengurangi biaya logistik, sehingga memfasilitasi perdagangan yang lebih *efisien*. Negara-negara seperti Pakistan, Kenya, dan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan arus perdagangan dan investasi langsung asing (FDI). Peningkatan infrastruktur di negara penerima, seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, rel kereta, dan bandara, telah memperbaiki *efisiensi* logistik dan perdagangan, mengurangi waktu dan biaya transportasi, serta membuka akses baru ke pasar global. Misalnya, proyek Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC) tidak hanya memperbaiki infrastruktur energi di Pakistan tetapi juga menciptakan konektivitas lebih baik dengan negara tetangga, meningkatkan perdagangan lintas batas. (Liu, 2020)

Peningkatan investasi asing langsung (FDI) yang signifikan di negara-negara peserta BRI, yang menarik lebih banyak investor luar negeri untuk mendirikan usaha, terutama di sektor manufaktur, energi, dan konstruksi. Proyek seperti Pelabuhan Gwadar di Pakistan dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia telah menarik dana asing dan membantu memacu aktivitas ekonomi lokal, meningkatkan kapasitas industri, serta menumbuhkan sektor ekonomi strategis. Selain itu adanya peningkatan lapangan kerja di negara-negara penerima BRI, yang terwujud melalui keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek-proyek konstruksi besar. Meskipun sebagian besar tenaga ahli datang dari Tiongkok, proyek BRI seperti pembangunan jalur kereta api Nairobi-Mombasa di Kenya membuka



ribuan pekerjaan bagi masyarakat setempat, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan lokal. Pertumbuhan PDB di beberapa negara peserta juga mengalami peningkatan berkat proyek infrastruktur BRI. Di Sri Lanka, misalnya, proyek Pelabuhan Hambantota dan pembangunan bandara telah meningkatkan akses perdagangan dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor logistik. Hal ini menunjukkan bagaimana proyek BRI dapat menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang semula infrastrukturnya terbatas.

Dengan begitu signifikan perkembangan perekonomian negara tujuan BRI termasuk Indonesia. Hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok diawali dengan interaksi perdagangan melalui jalur laut yang menghubungkan Nusantara dengan dinasti-dinasti Tiongkok. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, hubungan diplomatik resmi antara kedua negara dibangun pada 1950, ditandai dengan penandatanganan perjanjian persahabatan dan perdagangan. Namun, hubungan ini mengalami pasang surut selama era Orde Baru karena ketegangan politik dan ideologis, hingga normalisasi terjadi pada awal 1990-an. Sejak saat itu, hubungan kedua negara semakin berkembang, dengan penguatan kerja sama dalam sektor ekonomi, perdagangan, dan investasi. serta memperkuat hubungan politik melalui kunjungan tingkat tinggi dan partisipasi dalam forum-forum multilateral.

Tiongkok mulai menawarkan kerjasama *Belt and Road Initiative* (BRI) kepada Indonesia dikenalkan tahun 2013, ketika inisiatif tersebut

pertama kali diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping, dalam kunjungannya ke Indonesia, Xi Jinping mengungkapkan niat Tiongkok untuk memperluas kerjasama infrastruktur dan ekonomi, penguatan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi terus diperluas dengan negara-negara yang berada di sepanjang Jalur Sutra Baru, termasuk Indonesia. Pada September 2013, Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping, secara resmi mengumumkan inisiatif ambisius yang dikenal sebagai *One Belt, One Road* (OBOR) dalam kunjungannya ke Kazakhstan dan Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Xi Jinping memaparkan visi besar Tiongkok untuk menghidupkan kembali jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika sebagai upaya memperkuat kerja sama ekonomi internasional sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur global. Inisiatif ini mencakup dua elemen utama: *Silk Road Economic Belt* (Sabuk Ekonomi Jalur Sutra), yaitu jalur darat yang menghubungkan Tiongkok melalui Asia Tengah hingga Eropa; dan *21st Century Maritime Silk Road*, yaitu jalur laut yang membentang dari Tiongkok melalui Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Arab hingga ke Eropa.

Xi Jinping menyatakan bahwa *Initiative* ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas regional, dan membangun jejaring kerjasama yang lebih erat antara negara-negara yang terlibat. Pengumuman tersebut menciptakan momentum awal untuk pengembangan *Belt and Road Initiative* (BRI) yang kemudian menjadi perwujudan praktis dari visi tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Xi Jinping menegaskan

pentingnya kolaborasi internasional yang saling menguntungkan, dengan menyatakan bahwa *Belt and Road Initiative* (BRI) dirancang tidak hanya untuk memberikan keuntungan bagi Tiongkok, tetapi juga untuk membawa manfaat yang signifikan bagi komunitas global secara keseluruhan. Pengumuman ini menjadi tonggak awal dalam perjalanan implementasi BRI dan menandai langkah signifikan Tiongkok dalam mengambil peran yang lebih aktif dalam perkembangan ekonomi dan geopolitik global.

Konsep *Belt and Road Initiative* (BRI) mencerminkan dua jalur utama yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan kerjasama ekonomi di berbagai wilayah. *Silk Road Economic Belt* (*Sabuk Ekonomi Jalur Sutra*) mengacu pada konsep "Belt," yakni jalur darat yang dirancang untuk menghubungkan Tiongkok dengan Eropa melalui wilayah Asia Tengah dan Timur Tengah. Jalur ini bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur di sepanjang rute strategis tersebut. Jalur ini mengikuti sepanjang jalur perdagangan sejarah seperti Jalur Sutra dan Jalur Rempah, membentang dari Tiongkok Barat melalui Asia Tengah, Iran, Turki, dan akhirnya mencapai Eropa Timur. Infrastruktur utama yang dikembangkan melibatkan pembangunan jaringan transportasi, seperti jalan raya dan rel kereta api, yang mendukung pertukaran barang dan layanan antarnegara. *21st Century Maritime Silk Road* Konsep "Road" merujuk pada jalur laut yang menghubungkan pelabuhan Tiongkok dengan pelabuhan di Asia Tenggara, Laut Cina Selatan, Laut Arab, dan akhirnya Eropa. Ini mencakup jalur perdagangan laut yang

melibatkan sejumlah pelabuhan strategis di sepanjang jalur, memfasilitasi perdagangan maritim dan investasi di wilayah-wilayah tersebut. Proyek-proyek infrastruktur di pelabuhan, termasuk pelabuhan-pelabuhan modern, terminal kontainer, dan fasilitas pelabuhan lainnya, dirancang untuk meningkatkan kapasitas logistik dan efisiensi pengiriman. (Yudilla, 2019)

Peta rute yang diusulkan untuk BRI menggambarkan jaringan lintas batas yang luas, menghubungkan berbagai negara dan wilayah dengan tujuan meningkatkan konektivitas, pertukaran ekonomi, dan kerjasama antarnegara. Dalam pelaksanaannya, peta rute ini terus berubah dan disesuaikan dengan perkembangan proyek serta respons dari negara-negara mitra. Rencana pembangunan infrastruktur yang mendukung Belt and Road Initiative (BRI) mencakup berbagai proyek strategis di berbagai sektor untuk meningkatkan konektivitas dan kerjasama antarnegara. Beberapa komponen utama dari rencana ini melibatkan sektor transportasi, energi, telekomunikasi, Konsep "*Belt*" dan "*Road*" mengilustrasikan komitmen Tiongkok untuk membangun jembatan ekonomi dan budaya yang kuat antara berbagai negara, menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan di seluruh dunia.

*Belt and Road Initiative* (BRI) memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara partisipan melalui berbagai sektor. Salah satu kontribusi utamanya adalah dukungan dalam pembangunan proyek infrastruktur, yang menjadi fondasi penting bagi konektivitas global dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. yang

mencakup jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi. Peningkatan konektivitas ini membuka akses ke pasar internasional dan membantu negara-negara penerima untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi dalam proyek-proyek infrastruktur, BRI merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, termasuk konstruksi, manufaktur, dan jasa terkait. Ini menciptakan peluang pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan merangsang aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu BRI dapat membantu negara-negara penerima untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dengan memperluas diversifikasi sumber daya dan kegiatan ekonominya. Proyek-proyek ini dapat membantu mengembangkan sektor-sektor baru dan merangsang inovasi ekonomi, Infrastruktur yang dibangun di bawah BRI memungkinkan negara-negara penerima untuk lebih mudah mengakses pasar global dan meningkatkan daya saing mereka. (Firdaus, 2020)

Indonesia, sebagai salah satu negara partisipan dalam *Belt and Road Initiative* (BRI), memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan inisiatif ini melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas regional, Indonesia telah menerima sejumlah investasi dari Tiongkok, terutama dalam proyek infrastruktur. Salah satu proyek yang paling mencolok adalah Kereta Api Cepat Indonesia-China, yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transportasi, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional,

khususnya di Jawa Barat (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2020).

Peningkatan konektivitas transportasi dan telekomunikasi mendukung ekspor dan impor, membantu perusahaan lokal mengeksplorasi peluang bisnis di tingkat internasional. Proyek-proyek BRI di sektor energi membantu negara-negara penerima untuk mengamankan pasokan energi yang lebih terjangkau dan andal. Ini dapat mendukung pertumbuhan industri dan membantu mengatasi kekurangan energi. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, BRI dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial. Pembangunan infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Melalui berbagai cara inilah, BRI berusaha untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara-negara yang terlibat, dengan memberikan dampak positif dalam jangka panjang seperti implementasi BRI di Indonesia. (Octorifadli, 2021)

Sebelum investasi besar dari *Belt and Road Initiative* (BRI), perekonomian Indonesia mendapatkan peningkatan signifikan di beberapa sektor utama. Sektor industri dan manufaktur menyumbang sekitar 20% dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019, dengan pertumbuhan yang stabil didorong oleh industri tekstil, otomotif, dan elektronik. Sektor jasa juga mengalami perkembangan, berkontribusi lebih dari 50% terhadap PDB pada periode yang sama, didorong oleh pertumbuhan sektor perbankan, pariwisata, dan teknologi informasi.

Sementara itu, sektor pertanian tetap penting, meskipun kontribusinya menurun menjadi sekitar 13% dari PDB pada 2019, dengan fokus pada produksi minyak kelapa sawit, karet, dan kopi. Investasi asing langsung (FDI) mencapai sekitar USD 30,5 miliar pada tahun 2019, menunjukkan minat global yang kuat meskipun terdapat tantangan infrastruktur dan regulasi. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan ekonomi Indonesia meskipun masih ada tantangan seperti infrastruktur yang kurang memadai dan ketimpangan regional. Sejak tahun 2013, Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan kebijakan ekonomi, reformasi struktural, dan pertumbuhan sektor-sektor industri yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Di antara faktor-faktor tersebut adalah stabilitas politik yang meningkat, investasi asing yang masuk, pertumbuhan sektor konsumen, dan kemajuan dalam reformasi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,78%, seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik, hal ini dapat dijelaskan sebagai hasil dari berbagai faktor, termasuk pengaruh perbaikan perekonomian di beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan China. Adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut memainkan peran besar dalam mendorong ekspor dan impor Indonesia, serta sektor-sektor lainnya seperti pariwisata, hal ini menunjukkan ekonomi global berdampak pada perekonomian Indonesia, Peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara, terutama China yang merupakan inisiator Belt and Road Initiative (BRI), dapat menghasilkan lebih banyak investasi asing langsung

ke Indonesia. BRI menciptakan peluang investasi dan kerjasama ekonomi yang signifikan. Peningkatan permintaan global dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih fokus pada diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, dan memperluas basis ekonomi negara. Peningkatan pertumbuhan ekonomi global seringkali berkontribusi pada stabilitas mata uang dan meningkatnya kepercayaan investor yang dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

*Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia mencakup berbagai proyek besar yang dirancang untuk meningkatkan infrastruktur dan konektivitas di Indonesia. Proyek utama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang bertujuan mengurangi waktu perjalanan antara kedua kota menjadi kurang dari 40 menit. Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Jalan Tol Trans-Sumatera juga mendapat dukungan dari Tiongkok, bertujuan untuk memperkuat kapasitas logistik dan konektivitas regional. Selain itu, BRI juga melibatkan proyek pembangunan energi, infrastruktur teknologi, dan pengembangan kawasan ekonomi, yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor penting seperti energi, teknologi, dan kesehatan. Keseluruhan proyek ini dirancang untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan memperkuat hubungan bilateral dengan Tiongkok. Dalam fokus penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai



aspek yang menunjukkan dampak positif dan potensi manfaat dari proyek KCIC terhadap ekonomi nasional dan regional.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikelola oleh Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), tidak hanya merupakan investasi dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) yang dicanangkan oleh Tiongkok, tetapi juga diakui sebagai proyek strategis nasional bagi Indonesia. Dalam pembangunan infrastruktur, proyek ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan menghubungkan dua kota besar, Jakarta dan Bandung, proyek ini diharapkan dapat mengurangi waktu perjalanan, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penting yang dianggap memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. PSN diatur melalui sejumlah peraturan presiden, dengan fokus pada infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan, energi, dan kereta api. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menetapkan daftar proyek-proyek prioritas yang harus dipercepat pelaksanaannya. Perpres ini juga menciptakan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) yang bertanggung jawab mengawal pelaksanaan proyek dan

menyederhanakan prosedur birokrasi yang menghambat percepatan proyek tersebut.

Seiring berjalannya waktu, daftar proyek dalam PSN diperbarui beberapa kali, terutama melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Pembaruan ini memasukkan proyek-proyek baru yang relevan, termasuk proyek transportasi dan energi yang diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas dan ketahanan energi nasional. Perpres-perpres ini memberikan landasan hukum untuk mempercepat proyek dengan menyederhanakan proses perizinan, memastikan dukungan pembiayaan, dan memfasilitasi pembebasan lahan. Proyek-proyek yang masuk dalam PSN juga diharapkan dapat meningkatkan investasi, membuka peluang kerja, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia.

Selain itu juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja turut memperkuat pelaksanaan PSN dengan memberikan fleksibilitas dalam perizinan dan pembebasan lahan. UU Cipta Kerja dirancang untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang termasuk dalam PSN. Pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan proyek-proyek ini sebagai bagian dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Melalui regulasi ini, PSN tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi instrumen untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), melibatkan pembangunan jalur kereta cepat sepanjang sekitar 142 kilometer antara Jakarta dan Bandung. Kereta cepat ini dapat mengurangi waktu perjalanan antara kedua kota menjadi sekitar 40 menit, dibandingkan dengan waktu perjalanan menggunakan transportasi darat konvensional yang lebih lama. Peningkatan konektivitas ini berpotensi mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi transportasi. Dengan perjalanan yang lebih cepat, barang dan orang dapat berpindah dengan lebih efisien, mendukung kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi regional. Total biaya proyek diperkirakan mencapai sekitar 6 miliar USD, Pembangunan proyek ini dibiayai melalui skema pendanaan yang melibatkan pihak swasta, termasuk konsorsium investasi Tiongkok dan mitra lokal Indonesia. melibatkan penyediaan teknologi dan pengalaman konstruksi dari pihak Tiongkok. (Saputra, 2023)

Keberadaan stasiun-stasiun kereta cepat dapat memicu pengembangan ekonomi di sekitar area tersebut. Proyek KCIC diharapkan dapat merangsang pertumbuhan bisnis lokal, seperti pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran, yang akan meningkatkan peluang kerja dan pendapatan masyarakat setempat. Pengembangan kawasan sekitar stasiun dapat menarik investasi baru dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor terkait. Proyek ini dapat membuka peluang bagi industri konstruksi dan manufaktur lokal, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, proyek KCIC dapat menarik investasi tambahan dalam sektor infrastruktur dan

transportasi, serta menciptakan kesempatan bagi perusahaan lokal untuk terlibat dalam pengembangan dan operasional proyek. Dengan mengurangi waktu perjalanan dan meningkatkan efisiensi transportasi, proyek KCIC dapat meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pekerja dan pengusaha dapat lebih cepat dan mudah mengakses pasar, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing ekonomi regional. (Firdaus, 2020)

Kereta cepat Jakarta-Bandung dapat mendukung sektor pariwisata dengan membuat perjalanan antara kedua kota lebih cepat dan nyaman. Hal ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bandung dan sekitarnya, berkontribusi pada pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi terkait. Analisis ini juga akan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari proyek KCIC, termasuk rencana pengembangan masa depan dan potensi ekspansi. Evaluasi akan mencakup bagaimana proyek ini dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan ekonomi dan bagaimana hasil investasi dapat berkelanjutan. Dengan membahas poin-poin di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana proyek KCIC dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian Indonesia, lebih khusus pada daerah yang dilintasi oleh proyek KCIC serta mengevaluasi manfaat yang diharapkan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu inisiatif penting yang muncul dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan

Tiongkok dalam Belt and Road Initiative (BRI). Diluncurkan sebagai proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara, proyek ini mencerminkan semakin eratnya hubungan ekonomi kedua negara. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam menarik investasi asing, terutama dari Tiongkok, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran. Melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Tiongkok dan Indonesia berkolaborasi untuk mendanai proyek ini dengan model pendanaan joint venture, yang mencakup transfer teknologi dan modal dari Tiongkok ke Indonesia (Patunru & Surianta, 2020).

Dampak utama dari proyek ini adalah meningkatnya keterlibatan ekonomi Tiongkok di sektor infrastruktur Indonesia, di mana investasi besar dari Tiongkok tidak hanya mendukung pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat hubungan dagang dan investasi antara kedua negara. Proyek ini memungkinkan transfer teknologi dalam bentuk teknologi kereta cepat yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Indonesia, memperdalam ketergantungan ekonomi Indonesia pada Tiongkok dalam hal pendanaan dan teknis proyek infrastruktur. Di sisi lain, bagi Tiongkok, proyek ini memberikan peluang untuk memperluas pengaruh ekonominya di Asia Tenggara melalui BRI, meningkatkan ekspor teknologi, dan membangun reputasi sebagai mitra pembangunan strategis di kawasan (Wijaya, 2021).

Implementasi *Belt and Road Initiative* (BRI) di Indonesia juga dapat memiliki beberapa dampak yang memerlukan perhatian dan analisis, Salah

satu kritik utama terhadap BRI adalah potensi peningkatan utang bagi negara penerima investasi. Proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pinjaman dari China dapat menyebabkan beban utang yang berat bagi negara - negara penerima, termasuk Indonesia. Jika proyek-proyek tersebut gagal menghasilkan pendapatan yang cukup untuk melunasi utang, hal ini dapat mengakibatkan masalah keuangan jangka panjang dan bahkan krisis utang. Selain itu Bergantung pada investasi dari satu negara, terutama China, dapat meningkatkan ketergantungan ekonomi suatu negara pada negara tersebut. Ini dapat mengarah pada ketidakseimbangan ekonomi dan risiko politik, terutama jika hubungan diplomatik antara negara-negara terlibat memburuk. Banyak proyek infrastruktur BRI yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk kerusakan lingkungan, kehilangan habitat, dan polusi. Kurangnya regulasi lingkungan yang ketat dan pemantauan yang kurang dapat meningkatkan risiko ini.

Keputusan untuk memberikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) kepada China dipengaruhi oleh kombinasi aspek politik dan ekonomi yang kompleks. Dari sisi politik, keputusan ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat hubungan strategis dengan China sebagai mitra utama dalam pembangunan infrastruktur. Indonesia melihat Belt and Road Initiative (BRI) sebagai peluang untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang tercermin dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan proyek ini sebagai bagian dari

diplomasi ekonomi untuk menyeimbangkan pengaruh geopolitik di kawasan, terutama di tengah persaingan antara China dan negara-negara Barat.

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam keputusan ini. Salah satu pertimbangan utama adalah penawaran yang lebih menarik dari China dibandingkan Jepang, yang juga bersaing untuk mendapatkan proyek ini. China menawarkan pembiayaan proyek tanpa menggunakan jaminan pemerintah Indonesia dan tanpa pembiayaan langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Skema pendanaan ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang meyakinkan pemerintah Indonesia untuk memilih China sebagai mitra. Selain itu, proposal China dianggap lebih cepat dalam realisasi proyek, yang sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.

Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh potensi dampak ekonomi jangka panjang yang diharapkan dari proyek KCIC. Dengan memperpendek waktu tempuh antara Jakarta dan Bandung, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, dan mendorong investasi di daerah-daerah yang dilalui jalur kereta cepat. Selain itu, keterlibatan China sebagai investor utama dianggap dapat membuka peluang untuk transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas jaringan ekonomi Indonesia di pasar global, khususnya dalam konteks integrasi ekonomi Asia. Namun, keputusan ini juga menuai kritik

terkait risiko ketergantungan ekonomi terhadap China dan keberlanjutan pembiayaan proyek di masa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak BRI terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung dalam proyek KCIC, dengan fokus pada identifikasi dan evaluasi manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung yang diperoleh dari proyek-proyek infrastruktur yang didanai dan dibangun sebagai bagian dari BRI terutama dalam Pembangunan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Melalui analisis komprehensif, tesis ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penting mengenai sejauh mana BRI telah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia, serta memahami tantangan yang dihadapi dalam prosesnya.

Analisis BRI terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang-peluang baru yang muncul dari inisiatif tersebut. Hal ini dapat mencakup peluang investasi, peningkatan akses pasar, dan transfer teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Penelitian ini juga dapat memberikan landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan publik yang berhubungan dengan BRI. Informasi yang diperoleh dari analisis tersebut dapat membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang sesuai untuk memastikan bahwa partisipasi Indonesia dalam BRI memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. dan pembangunan nasional. Bagi para investor, baik lokal maupun asing, penelitian mengenai analisis BRI terhadap pertumbuhan ekonomi



Indonesia dapat menjadi sumber informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini dapat membantu para investor untuk memahami potensi pasar, risiko, dan peluang investasi yang terkait dengan proyek-proyek yang didukung oleh BRI di Indonesia.

Dengan melakukan penelitian yang objektif mengenai dampak Investasi BRI dalam Proyek KCIC terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung, hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek BRI di Indonesia. Ini dapat membantu dalam mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat. Dalam beberapa tahun terakhir, implementasi BRI telah menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang nyata, memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan daya saing industri nasional. Namun, di sisi lain, tantangan dan dampak negatif juga muncul, seperti risiko finansial, dampak lingkungan, dan ketergantungan ekonomi. Sebagai negara penerima BRI yang penting, Indonesia kini berada pada tahap kritis untuk merinci dan mengevaluasi dampak sektorial BRI agar dapat merencanakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Analisis yang menyeluruh terhadap dampak ini akan membantu Indonesia memitigasi risiko, meningkatkan manfaat, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, penelitian ini akan merinci lebih lanjut tentang bagaimana pembangunan infrastruktur KCIC yang didukung oleh Belt and Road Initiative dapat membuka peluang baru dalam berbagai sektor di sekitar proyek KCIC, dan Analisis tantangan yang diciptakan oleh BRI tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak spesifik di setiap sektor, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan dan membantu merumuskan kebijakan yang tepat demi kemajuan ekonomi Indonesia dalam memanfaatkan Belt and Road Initiative.

Jawa Barat, sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, dan Kabupaten Bandung memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, tantangan infrastruktur yang ada sering kali menghambat pertumbuhan ekonomi yang optimal. Dengan adanya investasi dalam proyek Kereta Api Cepat, diharapkan dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Bappenas, 2019). Kabupaten Bandung, sebagai salah satu wilayah yang dilalui oleh proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC), diharapkan akan mengalami dampak signifikan dari investasi ini. Kehadiran kereta cepat ini tidak hanya akan memperpendek waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung, tetapi juga akan membawa perubahan besar dalam aspek ekonomi dan sosial di Kabupaten Bandung.

Salah satu dampak utama yang diharapkan adalah peningkatan aksesibilitas dan logistik. Dengan adanya kereta cepat, distribusi barang dan

mobilitas tenaga kerja akan menjadi lebih efisien. Hal ini akan meningkatkan daya saing bisnis lokal, karena pelaku usaha dapat mengakses pasar yang lebih luas dengan biaya transportasi yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat. Aksesibilitas yang lebih baik juga akan memudahkan masyarakat untuk beraktivitas, baik dalam hal pekerjaan maupun pendidikan. Selain itu, pengembangan ekonomi lokal menjadi salah satu fokus utama dari proyek ini. Infrastruktur KCIC diharapkan dapat mendukung pembukaan kawasan ekonomi baru, seperti kawasan industri dan pariwisata di sekitar stasiun kereta. Dengan adanya kawasan-kawasan baru ini, peluang kerja akan meningkat, dan masyarakat setempat akan mendapatkan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan.

Kabupaten Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki posisi strategis dalam jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang menghubungkan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dengan Bandung, ibu kota Jawa Barat yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan pariwisata. Wilayah ini memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui penciptaan lapangan kerja baru, perubahan aktivitas ekonomi lokal, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut data BPS Kabupaten Bandung (2023), wilayah ini mencatat peningkatan aktivitas sektor perdagangan dan pariwisata sebesar 12% dalam lima tahun terakhir, seiring dengan dimulainya pembangunan proyek KCIC.

Peningkatan investasi swasta juga menjadi salah satu dampak positif yang diharapkan dari proyek KCIC. Dengan adanya infrastruktur modern, investor cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi di sektor-sektor lain, seperti properti dan manufaktur. Hal ini akan menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, di mana sektor-sektor yang saling terkait dapat berkembang secara bersamaan. Secara keseluruhan, proyek KCIC diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi Kabupaten Bandung, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas di Indonesia. Dengan demikian, investasi ini menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana investasi BRI melalui proyek KCIC memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung. Analisis ini juga akan memberikan wawasan strategis bagi pemerintah dan investor dalam mengelola proyek infrastruktur serupa di masa depan.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC), membawa berbagai permasalahan yang membutuhkan kajian lebih mendalam. Di Kabupaten Bandung, proyek ini memunculkan tantangan signifikan, seperti perubahan tata guna lahan yang mengancam keberlanjutan lingkungan, dampak sosial terhadap masyarakat yang terdampak relokasi, dan potensi ketergantungan ekonomi pada investasi asing. Selain itu, meskipun proyek ini menjanjikan manfaat berupa peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor pariwisata, belum ada kajian yang secara komprehensif mengevaluasi

sejauh mana manfaat tersebut dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal. Tantangan lain adalah adanya ketimpangan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai dampak jangka panjang proyek ini, terutama terkait utang luar negeri dan keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menganalisis dampak proyek KCIC secara holistik, termasuk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok, serta peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan kerja sama BRI.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana pengaruh proyek KCIC terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung ?
- 1.2.2 Bagaimana Pengaruh proyek KCIC terhadap hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok?
- 1.2.3 Apa peluang serta tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan kerjasama BRI?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Pengaruh Proyek (KCIC) Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi sekitar proyek terutama Kabupaten Bandung

Analisis akan fokus pada bagaimana proyek ini mempengaruhi ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur proyek kereta terutama Kabupaten Bandung. Beberapa aspek yang akan dievaluasi meliputi : 1) Penciptaan lapangan pekerjaan, mengkaji jumlah lapangan kerja yang tercipta selama fase konstruksi dan

operasional proyek, serta dampaknya terhadap tingkat pengangguran di wilayah sekitar. 2) sektor-sektor seperti real estat, perhotelan, dan perdagangan yang mungkin mengalami pertumbuhan akibat peningkatan konektivitas dan aksesibilitas. 3) Dampak Ekonomi Lokal, Analisis akan mencakup perubahan dalam pendapatan lokal, aktivitas ekonomi, dan daya beli masyarakat di sekitar jalur proyek.

### **1.3.2 Pengaruh Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terhadap Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana proyek ini mempengaruhi hubungan ekonomi bilateral antara kedua negara. Aspek-aspek yang akan dianalisis adalah: 1) Investasi dan Kerjasama: Penelitian akan mengevaluasi volume investasi yang dilakukan oleh pihak Tiongkok dalam proyek KCIC dan dampaknya terhadap kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. 2) Hubungan Diplomatik dan Ekonomi: Penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana proyek ini mempengaruhi hubungan diplomatik dan ekonomi secara keseluruhan, termasuk dampak pada kerjasama di sektor lain.

### **1.3.3 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Indonesia dalam Kerjasama BRI.**

Kerjasama *Belt and Road Initiative* (BRI) menawarkan berbagai peluang dan tantangan bagi Indonesia, terutama dalam proyek infrastruktur besar seperti KCIC. Penelitian ini akan

mengidentifikasi dan menganalisis: 1) Peluang Ekonomi, Penelitian akan menjelaskan bagaimana kerjasama BRI membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk peningkatan investasi asing, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan konektivitas yang mendukung perdagangan dan pariwisata. 2) Tantangan Implementasi: Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek BRI, seperti masalah pembiayaan, keterlambatan, dan risiko sosial-ekonomi, akan dianalisis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana tantangan ini mempengaruhi keberhasilan proyek dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

#### **1.4 Hipotesis**

Hipotesis pertama berfokus pada hubungan antara pembangunan Proyek KCIC dan peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Bandung. Berdasarkan asumsi bahwa proyek infrastruktur besar, seperti KCIC, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta merangsang sektor-sektor ekonomi utama seperti UMKM, pariwisata, dan sektor industri, hipotesis ini menguji apakah proyek KCIC telah berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hipotesis kedua menguji dampak Proyek KCIC terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, terutama dalam

konteks perdagangan dan kerjasama ekonomi. Dengan melihat peningkatan volume perdagangan dan investasi asing yang dihasilkan dari proyek ini, hipotesis ini bertujuan untuk menilai apakah proyek KCIC menjadi katalisator dalam mempererat hubungan antara kedua negara, serta mengukur dampaknya terhadap hubungan diplomatik dan kerjasama di sektor-sektor lain seperti energi, pendidikan, dan SDM.

Hipotesis ketiga mengkaji peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menjalankan proyek besar seperti KCIC, yang merupakan bagian dari BRI. Penelitian ini menguji apakah proyek ini membuka peluang bagi peningkatan infrastruktur nasional, transfer teknologi, dan peningkatan ekonomi melalui kerjasama internasional. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti ketergantungan pada pendanaan asing, potensi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta masalah lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat dari proyek tersebut.

Berdasarkan analisis awal, dapat disimpulkan bahwa Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC), memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung. Proyek ini diduga meningkatkan volume perdagangan bilateral Indonesia-Tiongkok, mempercepat aliran investasi asing, serta membuka peluang bagi transfer teknologi dan keahlian. Selain itu, proyek ini juga berpotensi mengatasi tantangan ketergantungan pada pendanaan asing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui penciptaan



lapangan kerja baru dan perkembangan sektor UMKM. Oleh karena itu, hipotesis ini menduga bahwa Proyek KCIC secara signifikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok.

### **1.5 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar jalur proyek terutama di wilayah Kabupaten Bandung. Dengan menganalisis dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, pengembangan sektor-sektor terkait, dan perubahan dalam aktivitas ekonomi lokal, hasil penelitian dapat membantu pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari proyek infrastruktur besar. Penelitian ini juga akan menyediakan data yang berguna untuk merencanakan proyek serupa di masa depan dan mengoptimalkan investasi infrastruktur untuk pertumbuhan regional yang berkelanjutan.

Menilai dampak proyek KCIC terhadap hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok penting untuk memahami bagaimana inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) mempengaruhi kerjasama bilateral. Penelitian ini dapat memberikan informasi kritis tentang bagaimana investasi Tiongkok dalam proyek infrastruktur berkontribusi pada hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua

negara. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkuat kerjasama di sektor lain, memfasilitasi perundingan bilateral, dan menilai potensi peluang serta tantangan dalam hubungan ekonomi jangka panjang antara Indonesia dan Tiongkok.

Penelitian mengenai peluang dan tantangan dalam kerjasama Belt and Road Initiative (BRI) memiliki signifikansi yang tinggi karena memberikan pemahaman tentang bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh BRI sambil mengatasi tantangan yang mungkin timbul. Dengan mengidentifikasi potensi keuntungan, seperti peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur, serta tantangan seperti pembiayaan dan dampak sosial-ekonomi, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan perencana proyek dalam merancang strategi yang efektif. Hasil penelitian akan membantu memastikan bahwa kerjasama BRI berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan meminimalkan risiko yang terkait.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan gambaran besar dan analisis utama yang mencakup berbagai aspek terkait dampak investasi Belt and Road Initiative (BRI) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung, khususnya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC). Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab yang saling terkait, yang akan disusun dengan urutan sebagai berikut:

## **BAB I - PENDAHULUAN**

Bab ini akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka berpikir yang mendasari penelitian ini. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan konteks dari penelitian yang dilakukan, yaitu bagaimana dampak dari investasi BRI dapat memengaruhi sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Bandung, terutama dengan adanya proyek KCIC. Penulis juga akan menggambarkan pentingnya topik ini dalam konteks pembangunan ekonomi lokal dan keterkaitannya dengan kebijakan nasional dan internasional.

## **BAB II - TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, termasuk teori liberalisme, yang akan digunakan sebagai kerangka analisis. Selain itu, bab ini akan mengulas hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dampak investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah berkembang, khususnya di Indonesia. Referensi yang diambil dari buku, jurnal, dan artikel terkait akan digunakan untuk mendukung teori yang dipilih dan memberikan konteks terhadap permasalahan yang diteliti.

## **BAB III - METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan pendekatan dengan metode penelitian yang diterapkan, yaitu metode kualitatif digunakan dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan serangkaian

langkah dalam pengumpulan data, meliputi wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, observasi terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, serta studi dokumentasi dari berbagai sumber yang mendukung. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan teknik analisis yang digunakan untuk memproses data yang telah diperoleh, serta bagaimana keabsahan dan validitas penelitian dijaga, termasuk teknik triangulasi yang digunakan untuk memperkuat temuan penelitian.

#### **BAB IV – HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini adalah inti dari tesis yang berisi hasil analisis dan pembahasan terhadap data yang telah dikumpulkan. Penulis akan membahas dampak investasi BRI terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung, dengan fokus pada sektor-sektor ekonomi yang terpengaruh, seperti peningkatan lapangan kerja, pariwisata, UMKM dan PRDB. Selain itu, penulis juga akan membahas menganalisis dampak dari proyek terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dengan China dengan menjelaskan apa saja hubungan Kerjasama yang terbentuk akibat keberhasilan proyek sebelumnya. Dalam bab ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pejabat Kemenko Perekonomian, Direktur KCIC dan pejabat daerah yaitu kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten bandung, serta Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bandung. Data Sekunder akan

didapatkan dari sumber terpercaya BPS, BKPM, berbagai dokumen dan laporan akan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendalam.

## **BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab 5 adalah bagian terakhir dalam bab ini akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam Bab IV. Penulis akan memberikan gambaran tentang sejauh mana investasi BRI, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung. Dampaknya terhadap hubungan antara negara Indonesia dengan China serta tantangan dan peluang yang diciptakan akibat adanya investasi dalam proyek KCIC. Selain itu, penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari proyek ini, serta mengurangi risiko ketergantungan terhadap investasi asing. Saran juga akan mencakup langkah-langkah kebijakan yang perlu diterapkan untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi.